

**ANALISIS PENERIMAAN DAERAH DARI  
INDUSTRI PARIWISATA DI PROVINSI DKI  
JAKARTA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHINYA**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**RISKA ARLINA**  
**NIM. C2B009062**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**SEMARANG**  
**2013**

Nama Penyusun : Riska Arlina

Nomor Induk Mahasiswa : C2B009062

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / IESP

Judul Skripsi : **“ANALISIS PENERIMAAN  
DAERAH DARI INDUSTRI  
PARIWISATA DI PROVINSI  
DKI JAKARTA DAN FAKTOR-  
FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHINYA”.**

Dosen Pembimbing : Evi Yulia Purwanti, SE., MSi,

Semarang, 13 Juni 2013

Dosen Pembimbing,

(Evi Yulia Purwanti, SE., MSi,)

NIP. 19710725 199702 2001

## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Riska Arlina

Nomor Induk Mahasiswa : C2B009062

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / IESP

Judul Skripsi : **“ANALISIS PENERIMAAN  
DAERAH DARI INDUSTRI  
PARIWISATA DI PROVINSI  
DKI JAKARTA DAN FAKTOR-  
FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHINYA**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal

Tim Penguji:

1. Evi Yulia Purwanti,SE,M.Si (.....)
2. Prof.Dr.FX.Sugiyanto,MS (.....)
3. Achma Hendra Setiawan,SE,M.Si (.....)

Semarang, 13 Juni 2013

Pembantu Dekan I,

(Anis Chariri, S.E, M.Com, Ph.D, Akt)

NIP. 19670809 199203 1001

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Riska Arlina menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Analisis Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata di Provinsi DKI Jakarta dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan yang saya salin, tiru, atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan tulisan aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 13 Juni 2013

Yang membuat pernyataan,

(Riska Arlina)

NIM : C2B009062

## **ABSTRACT**

*DKI Jakarta as a capital city of Indonesia has a high potential tourism to be developed. Yet, the contribution of the tourism industry to the PAD is smaller than the contribution of non tourism sector. This research aims to analyze the influence of the number of foreign and domestic tourists, investments in tourism industry, USD exchange rate, and the safety factor to local revenues of the tourism industry in Jakarta.*

*This research used multiple linear regression (OLS), in 1991-2012. Type of data used is secondary data obtained from Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, Department of Tourism and Culture Jakarta Capital City Government, Indonesia Investment Coordinating Board and other literature such as books and economic journals.*

*The result of regression analysis showed that the variable number of foreign and domestic tourists and USD exchange rate influence significantly to local revenues of the tourism industry in Jakarta whereas investment in tourism and safety factors variable had no significant effect. Simultaneous test result showed that overall variable number of foreign and domestic tourists, investment in tourism, USD exchange rate, and safety factor together indicate effect to local revenue of the tourism industry in Jakarta. R-square value of 0,930 which mean 93 percent of local revenue of the tourism variation can be explain from fourth variation of the independent variables (number of foreign and domestic tourist, investment in tourism, USD exchange rate and safety factor), whereas the remaining 7 percent is explained by other factor beyond the model.*

**Keywords:** *PAD, The number of foreign and domestic tourists, Investment in tourism industry, USD exchange rate, Safety factor*

## ABSTRAKSI

Provinsi DKI Jakarta memiliki potensi pariwisata yang tinggi untuk dikembangkan. Namun, kontribusi industri pariwisata terhadap PAD masih cenderung kecil apabila dibandingkan dengan kontribusi industri non pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang pengaruh jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara, investasi diindustri pariwisata, nilai kurs USD, dan faktor keamanan terhadap penerimaan daerah dari industri pariwisata di Provinsi DKI Jakarta.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda (OLS) dengan waktu penelitian 1991-2012. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan literatur-literatur lainnya seperti buku-buku, dan jurnal-jurnal ekonomi.

Hasil analisa regresi menunjukkan bahwa variabel jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara serta nilai kurs USD menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan daerah dari industri pariwisata di Provinsi DKI Jakarta, sedangkan variabel investasi dibidang pariwisata dan faktor keamanan tidak berpengaruh signifikan. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara, investasi dibidang pariwisata, nilai kurs USD, dan factor keamanan secara bersama-sama menunjukkan pengaruhnya terhadap penerimaan daerah dari industri pariwisata di Provinsi DKI Jakarta. Nilai R-square sebesar 0,930 yang berarti sebesar 93 persen variasi penerimaan daerah dari industri pariwisata dapat dijelaskan oleh ke empat variabel independen (jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara yang berkunjung ke Provinsi DKI Jakarta, investasi dibidang pariwisata, nilai kurs valuta asing (USD), dan faktor keamanan), sedangkan sisanya 7 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang tidak termasuk dalam penelitian.

**Kata kunci** : PAD, jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara, investasi diindustri pariwisata, nilai kurs USD, faktor keamanan

## **KATA PENGANTAR**

Syukur yang teramat dalam penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT pemilik alam semesta atas segala nikmat dan rahmat-Nya, sehingga penulis mempunyai semangat dan kekuatan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Analisis Penerimaan Daerah dari Industri Pariwisata di Provinsi DKI Jakarta” ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua, babeh Ruki dan mama Lin, yang selalu mendoakan, memotivasi, mengarahkan dan membimbing penulis tanpa kenal lelah. Terima kasih atas kesabaran dan limpahan kasih sayangnya.
2. Ibu Evi Yulia Purwanti, S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar, bijaksana, serta sistematis membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk waktu, tenaga, pikiran, tawa, kritik dan saran yang telah ibu berikan untuk penulis.
3. Bapak Prof. Drs. H. Mohammad Nasir, M.Si, Akt, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
4. Ibu Fitri Arianti, S.E, M.Si, selaku Dosen Wali atas segala arahnya selama penulis menempuh pendidikan.
5. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro, yang telah banyak memberikan

dan mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan.

6. Bapak Asep selaku staf keuangan dan staf lainnya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih atas diskusi dan data yang diberikan.
7. Mbak Ike selaku staf Informasi dan Pelayanan Data dan staf lainnya di Badan Koordinasi dan Penanaman Modal. Terima kasih atas data yang diberikan.
8. Ibu Mayanggita Kirana, S.E, M.Si, dan mba retno yang telah sabar mengajarkan cara mengolah data dan interpretasi data.
9. Kakak-kakakku ujo iki, ujo ovan & mba pipit, serta ujo dhona & mba nita terima kasih atas doa, kasih sayang, dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan dan menulis skripsi.
10. Sahabat penulis terutama Qhey, Chika, Cinta, Furry, Zenna dan Lea atas kesederhanaan, cita-cita, dan semangat juang yang tinggi. Terima kasih sudah menerima kekurangan dan kelebihan saya. I Love You All :\*
11. Keluarga besar IESP FE UNDIP 2009. yogi, rudi, ifam, adit, dogol, aples, danu, arya, ditya, dkk. Terima kasih atas tawa, duka, kerjasama dan kekompakannya selama ini.
12. Teman-teman yang sering aku repotin selama kuliah dan ngerjain skripsi, cunpe, tutusxxx, shuna, chanip, kaisar, muji, tiko dll.
13. Sahabat pengurus HMJ IESP UNDIP terutama periode 2010/2011 serta untuk periode sebelum dan selanjutnya. IESP JAYA!

14. Keluarga besar FEPALA UNDIP, yaitu arsono, anggar, aji, theo, smar, zul, mari, geral, aryani, nickie, deny. Fepala XXI, XXII, seterusnya dan sebelumnya. Terima kasih atas kekeluargaan yang tulus, tanggung jawab dan loyalitas serta cita-cita baru untuk saya kedepan. FEPALA JAYA!!
15. Teman-teman UPK TARI FEB UNDIP terutama tari saman, yaitu maya, fani, tami, ainun, ovi, intan, octa, riris, tia, fanie, mila, fifie, deby, tarina, rigiz, silvi. Terima kasih telah menyalurkan kerinduan saya akan seni tari.
16. The last but not for the least, anak-anak KOE, yaitu tika, iin, ica, mia, balqis, intan, maje, dan anggi atas gosip, lemak jahat, mulut jahat, suka dan duka serta semangat selama penulis mengerjakan skripsi.
17. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan segenap kerendahan hati, penulis berharap semoga segala kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk penelitian yang lebih baik di masa yang akan datang, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Semarang, 13 Juni 2013

Penulis

Riska Arlina

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Kegunaan Penelitian.....	16
1.5 Sistematika Penulisan .....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	18
2.1 Landasan Teori .....	18
2.1.1 Penerimaan.....	18
2.1.2 Penerimaan Daerah.....	18
2.1.3 Penerimaan Pariwisata.....	19
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah.....	20
2.1.5 Pajak Daerah.....	21
2.1.5.1 Pengertian Pajak Daerah.....	21
2.1.5.2 Pajak Hotel.....	22
2.1.5.3 Pajak Restoran.....	23
2.1.5.4 Pajak Hiburan.....	25
2.1.5.5 Fungsi Pajak.....	26
2.1.6 Retribusi Daerah.....	27
2.1.6.1 Pengertian Retribusi Daerah.....	27
2.1.6.2 Jenis-Jenis Retribusi Daerah.....	27
2.1.6.3 Objek Retribusi Daerah.....	29
2.1.6.4 Subjek Retribusi Daerah.....	29
2.1.7 Kepariwisata.....	30
2.1.7.1 Pariwisata.....	30
2.1.7.2 Industri.....	31
2.1.7.3 Industri Pariwisata.....	33
2.1.8 Wistawan dan Hubungan Jumlah Wisatawan dengan Penerimaan Daerah dari Industri Pariwisata.....	34
2.1.8.1 Wisatawan.....	34
2.1.8.2 Hubungan Junlah Wisatawan dengan	

Penerimaan Daerah dari Industri Pariwisata.....	35
2.1.9 Investasi di Industri Pariwisata dan Hubungan Investasi di Industri Pariwisata dengan Penerimaan Daerah dari Industri Pariwisata.....	36
2.1.9.1 Investasi Di Industri Pariwisata.....	36
2.1.9.2 Hubungan Investasi di Industri Pariwisata dengan Penerimaan Daerah dari Industri Pariwisata.....	38
2.1.10 Nilai Kurs USD dan Hubungan Nilai Kurs USD dengan Penerimaan Daerah dari Industri Pariwisata.....	40
2.1.10.1 Nilai Kurs USD.....	40
2.1.10.2 Hubungan Nilai Kurs USD dengan Penerimaan Daerah dari Industri Pariwisata.....	42
2.1.11 Faktor Keamanan dan Hubungan Faktor Keamanan dengan Penerimaan Daerah dari Industri Pariwisata.....	41
2.1.11.1 Faktor Keamanan.....	43
2.1.11.2 Hubungan Faktor Keamanan dengan Penerimaan Daerah dari Industri Pariwisata.....	44
2.2 Penelitian Terdahulu.....	45
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	52
2.4 Hipotesis.....	55
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	57
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	57
3.1.1 Variabel Penelitian.....	57
3.1.2 Definisi Operasional.....	58
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	60
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	61
3.4 Metode Analisis Data.....	61
3.4.1 Uji Asumsi Klasik.....	61
3.4.1.1 Uji Heterokedastisitas.....	61
3.4.1.2 Uji Autokorelasi.....	62
3.4.1.3 Uji Multikolinearitas.....	63
3.4.1.4 Uji Normalitas.....	64
3.4.3 Uji Kriteria Statistik.....	67
3.4.3.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	67
3.4.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	67
3.4.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji statistik t).....	68
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	72
4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	72
4.1.1 Kondisi Geografis.....	72
4.1.1.1 Batas Administrasi Daerah dan Luas Wilayah.....	72
4.1.2 Kondisi Demografis.....	74
4.1.3 Kondisi Ekonomi.....	75
4.1.4 Potensi Pariwisata Provinsi DKI Jakarta.....	78

4.1.5 Penerimaan Daerah dari Industri Pariwisata.....	86
4.2 Deskripsi Variabel.....	89
4.2.1 Jumlah Wisatawan.....	89
4.2.2 Investasi di Industri Pariwisata.....	92
4.2.3 Kurs USD.....	95
4.2.4 Faktor Keamanan.....	98
4.3 Analisis Data dan Pembahasan.....	100
4.3.1 Analisis Uji Penyimpangan Klasik.....	100
4.3.1.1 Uji Multikolinearitas.....	100
4.3.1.2 Uji Autokorelasi.....	101
4.3.1.3 Uji Heterokedastisitas.....	103
4.3.1.4 Uji Normalitas.....	104
4.3.2 Analisis Regresi Linear Berganda.....	105
4.3.3 Pengujian Hipotesis.....	107
4.3.3.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	107
4.3.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	107
4.3.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t).....	108
4.3.4 Interpretasi Ekonomi.....	112
BAB V PENUTUP .....	116
5.1 Kesimpulan dan Saran.....	116
5.1.1 Kesimpulan.....	116
5.1.2 Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA .....	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	123

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Provinsi DKI Jakarta Tahun 2001-2010.....	5
Tabel 1.2 Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Provinsi DKI Jakarta Tahun 2001-2010.....	6
Tabel 1.3 Sumbangan Industri Pariwisata Terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2002-2010.....	7
Tabel 1.4 Sumbangan Industri Pariwisata Terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2002-2010.....	8
Tabel 1.5 Rata-Rata Pengeluaran Wisman dan Wisnus di Provinsi DKI Jakarta.....	10
Tabel 1.6 Jumlah Hotel dan Akomodasi lain di Provinsi DKI Jakarta.....	10
Tabel 1.7 Data Usaha Perjalanan Wisata (TRAVEL) di Provinsi DKI Jakarta.....	12
Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	49
Tabel 4.1 Luas Wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta.....	73
Tabel 4.2 Pembagian Wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta.....	73
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta.....	74
Tabel 4.4 Prosentase Penduduk yang Bekerja (15 tahun ke atas) Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2010.....	75
Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Jakarta Tahun 2010 (10 tahun ke atas).....	76
Tabel 4.6 Laju Pertumbuhan Tahun 2007-2010 Menurut Lapangan Usaha	77
Tabel 4.7 Obyek Wisata/Tempat Rekreasi di Provinsi DKI Jakarta.....	79
Tabel 4.8 Data Jumlah Industri Pariwisata di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2011.....	82
Tabel 4.9 Data Usaha Konvensi & Impesariat di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2011.....	85
Tabel 4.10 Penyelenggaraan Event Pariwisata dan Budaya Tahun 2011....	86
Tabel 4.11 Pendapatan Asli Daerah dari Industri Pariwisata Tahun 1991-2012.....	88
Tabel 4.12 Data Jumlah Kunjungan Wisnus dan Wisman ke Provinsi DKI Jakarta Tahun 1991-2012.....	91
Tabel 4.13 Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Industri Pariwisata di Provinsi DKI Jakarta Tahun 1991-2012.....	93
Tabel 4.14 Harga Jual Rata-Rata Valuta Asing Tahun 1991-2012.....	97
Tabel 4.15 Kondisi Keamanan Indonesia Tahun 1991-2012.....	99
Tabel 4.16 Hasil Uji Multikolinearitas.....	101
Tabel 4.17 Run Test.....	102
Tabel 4.18 Uji Heterokedastisitas dengan Uji Park	104
Tabel 4.19 Uji Kolmogorov-Smirnov.....	105
Tabel 4.20 Ringkasan Hasil Estimasi Regresi.....	106
Tabel 4.21 Hasil Regresi.....	113

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	55
Gambar 4.1 Laju Pertumbuhan (%), 2006-2010.....	77
Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas.....	103
Gambar 4.3 Uji Hipotesis Secara Simulatan (Uji F).....	108

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A.....	124
DATA MENTAH.....	124
Data A.1 Data Mentah Pengolahan Regresi.....	124
LAMPIRAN B HASIL REGRESI.....	125
B.1 Hasil Output Regresi.....	125
LAMPIRAN C UJI NORMALITAS.....	130
Hasil Uji Normalitas Model Regresi.....	130
LAMPIRAN D UJI ASUMSI KLASIK.....	132
D.1 Uji Multikolinearitas.....	132
D.2 Uji Autokorelasi.....	133
D.3 Uji Heterokedastisitas.....	135

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pengembangan otonomi daerah yang luas dari pemerintah pusat ke pemerintah propinsi dan kabupaten/kota dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, menyebabkan terjadinya pengalokasian tugas, fungsi wewenang dan tanggung jawab pengelolaan lingkungan yang selama ini terkonsentrasi di pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dimana peran dan keterlibatan masyarakat akan semakin dominan serta memberikan kesempatan yang besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang optimal.

Setiap pemerintah daerah berlomba-lomba untuk dapat meningkatkan perekonomian daerahnya sendiri termasuk meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. PAD diartikan sebagai penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Untuk itu diperlukan adanya kreatifitas, inovasi dan pemikiran yang dinamis untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah dari masing-masing potensi daerah yang dimiliki.

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah, yaitu dengan mengoptimalkan potensi dalam industri pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi suatu Negara atau lebih khusus lagi pemerintah daerah. Dengan pariwisata, pemerintah daerah tempat obyek wisata itu berada, akan mendapatkan pemasukan dari pendapatan setiap obyek wisata. Disamping itu, pariwisata juga memiliki efek pengganda yang dapat menimbulkan tumbuhnya kegiatan usaha baru yang saling terkait seperti usaha makanan, *art shop*, ataupun *travel agent* yang bisa menambah pendapatan pemerintah di masing-masing daerah tujuan wisata. Pariwisata juga merupakan komoditas yang dibutuhkan oleh setiap individu.

Alasannya, karena aktivitas berwisata bagi seorang individu dapat menghilangkan kejenuhan dari aktivitas rutin yang dijalani dengan sekedar relaksasi, olahraga, berbelanja, ataupun belajar sejarah yang diharapkan dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Semakin tinggi pendidikan dan ekonomi seseorang atau masyarakat serta semakin tinggi waktu luang seseorang maka kebutuhan terhadap pariwisata akan semakin besar pula.

Pariwisata juga dapat mempengaruhi kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan budaya. Dari segi sosial, pariwisata akan memperluas kesempatan tenaga kerja baik dari kegiatan pembangunan sarana dan prasarana maupun dari berbagai kegiatan usaha yang langsung maupun yang tidak langsung berkaitan dengan kepariwisataan. Kaitannya dengan kegiatan para wisatawan dalam negeri, pariwisata dapat menumbuhkan sikap cinta tanah air dengan mengenal berbagai produk wisata dari masing-masing daerah tujuan wisata.

Dari segi ekonomi, pariwisata dapat memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah yang bersumber dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, retribusi penginapan/pesanggrahan/viila serta retribusi tempat rekreasi atau dapat mendatangkan devisa dari para wisatawan mancanegara yang berkunjung. Disamping itu, *multiplier effect* dari kegiatan berwisata dapat menumbuhkan kegiatan usaha ekonomi yang saling terkait sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dari segi budaya, pariwisata merupakan sarana untuk memperkenalkan alam dan kebudayaan daerah tujuan wisata. Hal ini dapat mendorong kreativitas masyarakat dalam menggali dan meningkatkan serta melestarikan seni budaya daerahnya.

Keterkaitan industri pariwisata dengan penerimaan daerah berjalan melalui jalur Pendapatan Asli Daerah (PAD) industri pariwisata. Menurut Tambunan (1999) yang dikutip oleh Rudy Badrudin (2001), bahwa industri pariwisata yang menjadi sumber PAD adalah industri pariwisata milik masyarakat daerah (*Community Tourism Development* atau CTD). Dengan mengembangkan CTD pemerintah daerah dapat memperoleh peluang penerimaan pajak dan beragam retribusi resmi dari kegiatan industri pariwisata yang bersifat multisektoral, yang meliputi hotel, restoran, usaha wisata, usaha perjalanan wisata, *profesional convention organizer*, pendidikan formal dan informal, pelatihan dan transportasi.

Menurut Spillane (1987), peranan pariwisata dalam pembangunan Negara pada garis besarnya berintikan tiga segi, yaitu segi ekonomis (sumber devisa dan pajak-pajak), segi sosial (penciptaan lapangan kerja), dan segi kebudayaan (memperkenalkan kebudayaan kita kepada wisatawan-wisatawan asing). Para

pakar ekonomi memperkirakan industri pariwisata akan menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang penting pada abad ke-21. Dalam perekonomian suatu negara, bila dikembangkan secara berencana dan terpadu, peran industri pariwisata akan melebihi sektor migas (minyak bumi dan gas alam) serta industri lainnya. Keberhasilan pengembangan sektor kepariwisataan, berarti akan meningkatkan perannya dalam penerimaan daerah, dimana kepariwisataan merupakan komponen utamanya dengan memperhatikan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti: jumlah obyek wisata yang ditawarkan, jumlah wisatawan yang berkunjung baik domestik maupun internasional, tingkat hunian hotel, pendapatan perkapita, faktor keamanan, nilai kurs, serta investasi di industri pariwisata.

Provinsi DKI Jakarta memiliki berbagai jenis wisata pilihan yang dapat dikunjungi wisatawan, mulai dari taman rekreasi, pusat-pusat perbelanjaan, event, wisata kuliner, wisata budaya dan wisata bahari. Provinsi DKI Jakarta juga merupakan daerah dengan jumlah museum dan tempat-tempat peninggalan bersejarah terbanyak ditambah dengan terselenggaranya berbagai atraksi pariwisata serta kegiatan kesenian dan kebudayaan di beberapa kawasan telah memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai “Destinasi Pariwisata”, di samping itu Provinsi DKI Jakarta memiliki fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas yang akan menunjang berkembangnya industri pariwisata. Komposisi penduduk yang datang dari berbagai daerah di Nusantara dengan berbagai suku, bahasa dan budaya yang dimiliki menjadikan Provinsi DKI Jakarta memiliki

keunikan tersendiri sebagai salah satu destinasi pariwisata yang patut untuk dikunjungi.

Berikut adalah tabel tentang kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus) yang berkunjung ke Provinsi DKI Jakarta.

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Provinsi DKI Jakarta**  
**Tahun 2001-2010**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wisman (Orang)</b>	<b>Pertumbuhan (%)</b>
2001	1.111.645	0,81
2002	1.267.695	5,87
2003	1.125.168	-11,24
2004	1.065.495	-5,30
2005	1.168.656	9,68
2006	1.216.132	4,06
2007	1.216.057	-0,01
2008	1.534.785	26,18
2009	1.451.914	-5,38
2010	1.892.866	30,37

*Sumber :BPS Pusat*

*BPS Provinsi DKI Jakarta, diolah*

Dari Tabel 1.1 diketahui bahwa perkembangan jumlah wisman yang berkunjung ke Provinsi DKI Jakarta cenderung fluktuatif dengan trend yang meningkat selama 10 tahun terakhir. Penurunan yang sangat tajam terjadi pada tahun 2003 sebesar -11,24% dengan jumlah wisman 1.125.168 orang. Sampai pada tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar 26,18% dengan jumlah wisman

1.534.432 orang. Selanjutnya pada tahun 2009 jumlah kunjungan wisman ke Provinsi DKI Jakarta kembali mengalami penurunan sebesar -5,38% dengan jumlah 1.451.914 orang. Dan meningkat tajam pada tahun 2010 sebesar 30.37% dengan jumlah 1.892.866 orang.

**Tabel 1.2**  
**Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Provinsi DKI Jakarta**  
**Tahun 2001-2010**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wisnus (Orang)</b>	<b>Pertumbuhan (%)</b>
2001	9.090.923	1,86
2002	9.108.728	0,20
2003	9.088.420	-0,22
2004	13.577.000	49,39
2005	11.746.250	-13,48
2006	12.777.571	8,78
2007	14.962.253	10,00
2008	15.741.967	12,00
2009	16.708.834	6,14
2010	18.045.541	8,00

*Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta, diolah*

Dari Tabel 1.2 diketahui bahwa perkembangan jumlah wisnus yang berkunjung ke Provinsi DKI Jakarta selama 10 tahun terakhir jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman dan trend jumlah kunjungan wisnus cenderung selalu mengalami peningkatan. Jumlah penurunan jumlah wisnus hanya terjadi pada tahun 2003 dan 2005. Tahun 2005 jumlah kunjungan wisnus mengalami penurunan yang sangat tajam sebesar -13,48% dengan jumlah

11.746.250 orang dari tingkat pertumbuhan 49,39% dengan jumlah 13.577.000 ditahun 2004 dan jumlah kunjungan wisnus terbesar terjadi pada tahun 2010 sebanyak 18.045.541 orang.

Dari pendapatan daerah yang ada, kontribusi industri pariwisata dan industri non pariwisata dalam struktur PAD dapat dilihat pada Tabel 1.3 dan Tabel 1.4 berikut ini:

**Tabel 1.3**  
**Sumbangan Industri Pariwisata Terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2002-2010**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan PAD Industri Pariwisata</b>	<b>PAD Prov. DKI Jakarta</b>	<b>Kontribusi (%)</b>
2002	502.052.018.418	4.509.529.747.000	11,13
2003	748.465.583.676	5.261.851.412.000	14,22
2004	743.046.156.995	6.430.334.808.000	11,55
2005	879.491.199.711	7.597.867.917.000	11,57
2006	1.077.627.466.830	7.817.457.600.000	13,78
2007	1.209.916.089.651	8.731.096.245.000	13,85
2008	1.524.882.384.329	10.455.565.541.000	14,58
2009	1.637.956.573.724	10.601.057.958.000	15,45
2010	1.867.949.106.953	12.891.992.182.000	14,48

*Sumber :- Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta  
- BPS Provinsi DKI Jakarta, diolah*

Dari Tabel 1.3 dan 1.4 dapat dilihat bahwa sumbangan industri pariwisata Provinsi DKI Jakarta terhadap Pendapatan Asli daerah Provinsi DKI Jakarta selama Sembilan tahun terakhir cenderung lebih kecil daripada sumbangan

industri non pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata 75,01 persen. Kontribusi terendah industri pariwisata terjadi pada tahun 2002 sebesar 11,13 persen dan terus mengalami peningkatan dan penurunan hingga kontribusi pariwisata tertinggi dapat dicapai pada tahun 2009 sebesar 15,45 persen lalu kembali mengalami penurunan ditahun 2010 sebesar 14,48 persen. Hal ini menggambarkan bahwa industri pariwisata di Provinsi DKI Jakarta belum bisa memberikan kontribusi yang maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah karena nilai kontribusi industri pariwisata cenderung lebih kecil bila dibandingkan dengan kontribusi industri non pariwisata.

**Tabel 1.4**  
**Sumbangan Industri Non Pariwisata Terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta**  
**Tahun 2002-2010**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan PAD Sektor Non Pariwisata</b>	<b>PAD Prov. DKI Jakarta</b>	<b>Kontribusi (%)</b>
2002	3.429.904.900.000	4.509.529.747.000	76,06
2003	4.077.416.900.000	5.261.851.412.000	75,50
2004	5.165.979.700.000	6.430.334.808.000	80,34
2005	6.029.745.000.000	7.597.867.917.000	79,36
2006	5.847.878.100.000	7.817.457.600.000	74,80
2007	6.653.978.500.000	8.731.096.245.000	76,21
2008	7.606.512.300.000	10.455.565.541.000	72,75
2009	7.277.192.500.000	10.601.057.958.000	68,65
2010	9.202.438.200.000	12.891.992.182.000	71,38

*Sumber :BPS Provinsi DKI Jakarta, diolah*

Industri pariwisata merupakan salah satu industri yang memegang peranan penting dalam penerimaan kas Negara (devisa) pada umumnya dan kas daerah (PAD) pada khususnya, untuk itu perlu adanya pengembangan industri pariwisata baik itu objek wisata atau fasilitas pendukung lainnya dengan bermuara pada peningkatan pendapatan. Syamsul Huda dalam penelitiannya tentang analisis penerimaan devisa sektor pariwisata dan faktor-faktor yang mempengaruhi di Provinsi Jatim, menunjukkan bahwa variabel kurs valuta asing (kurs Dollar Amerika Serikat) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan devisa sektor pariwisata dan diduga variabel kurs USD juga akan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah dari industri pariwisata.

Dimana pada saat rupiah terdepresiasi terhadap dollar US artinya harga produk wisata di Indonesia menjadi lebih murah, sehingga daya beli wisatawan mancanegara terhadap produk wisata Indonesia meningkat sehingga mendorong permintaan produk pariwisata Indonesia. Dengan demikian, depresiasi rupiah terhadap dollar US justru menguntungkan industri pariwisata dengan semakin bertambahnya jumlah kunjungan wisatawan (dengan asumsi mata uang wisman adalah dollar US) yang nantinya akan meningkatkan penerimaan daerah dari industri pariwisata. Begitu juga sebaliknya, daya beli wisatawan khususnya wisatawan mancanegara terhadap produk pariwisata Indonesia akan menurun ketika rupiah terapresiasi terhadap dollar US sehingga akan menurunkan jumlah penerimaan daerah dari industri pariwisata. Hal ini tetap berlaku walaupun jumlah wisatawan mancanegara cenderung lebih kecil dibandingkan dengan jumlah wisatawan nusantara, namun pengeluaran rata-rata per hari dari wisatawan

mancanegara lebih besar dari pengeluaran rata-rata per hari wisatawan nusantara.

Hal ini bisa dilihat pada tabel 1.5 berikut ini:

**Tabel 1.5**  
**Rata – Rata Pengeluaran Wisman dan Wisnus di Provinsi DKI Jakarta**

<b>Tahun</b>	<b>Pengeluaran Wisman (USD/hari)</b>	<b>Pengeluaran Wisnus (Rp/hari)</b>
2006	110,46	165.300
2007	126,86	170.000
2008	142,56	180.000
2009	137,38	200.000
2010	135,11	220.000

*Sumber: PES tahun 2004-2010, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta dalam Angka tahun 2002-2009, BPS Provinsi DKI Jakarta Hasil olahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta*

Keragaman produk dan potensi pariwisata yang ada ditambah dengan tersedianya fasilitas atau sarana penunjang pariwisata yang memadai seperti penginapan, akomodasi, biro perjalanan pariwisata, penyediaan pelayanan makanan dan minuman merupakan aset pariwisata yang besar dan dapat menjadi faktor penunjang dalam pengembangan industri pariwisata bagi Provinsi DKI Jakarta.

**Tabel 1.6**  
**Jumlah Hotel dan Akomodasi Lain di Provinsi DKI Jakarta**

<b>Tahun</b>	<b>Hotel</b>		<b>Akomodasi Lainnya</b>
	<b>Berbintang</b>	<b>Melati</b>	
2006	135	135	36
2007	142	142	37
2008	151	140	69
2009	153	141	56
2010	165	147	39

*Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta*

Hotel adalah tempat yang disediakan bagi para wisatawan untuk menginap selama mereka berkunjung atau tempat dalam melakukan kegiatan wisata. Disamping itu, sebelum melakukan perjalanan wisata, seorang wisatawan memerlukan informasi mengenai daerah yang akan dituju beserta fasilitas-fasilitasnya. Hotel merupakan sarana akomodasi utama yang ingin diketahui oleh wisatawan sebelum melakukan suatu perjalanan. Oleh karena itu, keberadaan hotel adalah mutlak diperlukan. Dalam lima tahun terakhir jumlah hotel berbintang dan melati yang tersedia terus menerus mengalami peningkatan. Walaupun jumlah akomodasi lainnya mengalami penurunan pada dua tahun terakhir, yaitu pada tahun 2009 dan tahun 2010.

Dengan meningkatnya jumlah hotel dari tahun ke tahun diharapkan juga dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga menarik banyak investor untuk menanamkan modal di Provinsi DKI Jakarta, khususnya untuk sektor perhotelan. Upaya menarik investasi juga dapat dilakukan dengan memberikan berbagai kemudahan prosedur dan mengurangi birokrasi. Arief Hartoko (2009) dalam penelitiannya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan daerah dari sektor pariwisata di Kotamadya Malang, menunjukkan bahwa variabel investasi sarana pariwisata berpengaruh nyata dan positif terhadap pendapatan daerah dari sektor pariwisata.

Usaha pariwisata merupakan kegiatan bisnis yang berhubungan langsung dengan kegiatan wisata sehingga tanpa keberadaannya, pariwisata tidak dapat berjalan dengan baik. Seperti halnya jasa biro perjalanan wisata yang

menyelenggarakan kegiatan paket wisata dan agen perjalanan. Berikut adalah tabel tentang data usaha perjalanan wisata (Travel) di Provinsi DKI Jakarta.

Dari Tabel 1.7 diketahui bahwa usaha perjalanan wisata yang ada di Provinsi DKI Jakarta dalam lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Jumlah usaha perjalanan wisata terbesar terdapat pada tahun 2010 sebanyak 2.248 perusahaan dan dari keempat jenis usaha perjalanan wisata tersebut, biro perjalanan wisata merupakan usaha perjalanan wisata terbanyak yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

**Tabel 1.7**  
**Data Usaha Perjalanan Wisata (TRAVEL)**  
**Di Provinsi DKI Jakarta**

No	Jenis Usaha	T A H U N				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Biro Perjalanan Wisata (BPW)	1,335	1,367	1,465	1,555	1,815
2	Cabang Biro Perjalanan Wisata (CBPW)	242	249	260	272	284
3	Agen Perjalanan Wisata (APW)	86	103	113	124	134
4	Sales Counter/Gerai Jual (GJ)	8	8	11	12	15
	<b>J U M L A H</b>	1,671	1,727	1,849	1,963	2,248

*Sumber : Bidang Industri Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta*

Disamping itu semua, ada beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan pariwisata di sebuah Negara pada umumnya dan di suatu daerah

pada khususnya. Menurut Parikesit dan Trisnadi (1997), pertumbuhan pariwisata dunia sangat dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor pertama adalah faktor luar, yaitu faktor yang tidak berkaitan langsung dengan industri pariwisata, misalnya isu keamanan, kesehatan dan stabilitas politik global. Faktor kedua adalah kekuatan pasar, yaitu permintaan, penawaran, dan distribusi produk serta pelayanan wisata.

Faktor keamanan merupakan faktor luar utama yang mempengaruhi bentuk permintaan pariwisata. Keamanan yang kurang kondusif, seperti kisruhnya pertikaian elite politik nasional, meningkatnya aksi unjuk rasa, kerusuhan, kriminalitas, dan pengeboman beberapa waktu yang lalu yang terjadi di beberapa titik utama DKI Jakarta, seperti ledakan bom yang terjadi di *Hotel JW Marriott* dan *Ritz Carlton* pada tahun 2009 menyebabkan citra pariwisata suatu daerah atau Negara pada umumnya menjadi sorotan dunia sehingga motivasi kunjungan wisatawan ke suatu daerah atau Negara akan berkurang dan berdampak pada pembatalan dan penundaan perjalanan wisata serta hal ini sekaligus menjadi bahan pertimbangan wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata. Hal ini diduga dapat mempengaruhi kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD DKI Jakarta.

Walaupun industri pariwisata bukan menjadi industri yang mendapat prioritas utama dalam meningkatkan perekonomian daerah, namun industri pariwisata bisa menjadi industri pendukung yang sangat potensial dalam memperbaiki struktur ekonomi daerah serta dapat meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah, seharusnya dengan meningkatnya jumlah fasilitas penunjang pariwisata seperti penginapan dan jasa perjalanan pariwisata yang ditawarkan,

jumlah pengunjung dan pendapatan dari industri pariwisata di Provinsi DKI Jakarta juga dapat lebih ditingkatkan lagi, dengan demikian diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui dampak industri pariwisata terhadap perekonomian daerah, dan juga sebagai salah satu faktor penentu dalam melihat tingkat kemandirian daerah adalah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima daerah tersebut. Keterkaitan industri pariwisata dengan penerimaan daerah berjalan melalui PAD industri pariwisata. PAD industri pariwisata ini bersumber dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, retribusi penginapan/pesanggrahan/villa, dan retribusi tempat rekreasi.

Provinsi DKI Jakarta memiliki potensi pariwisata yang besar untuk dikembangkan. Hal ini dapat dilihat melalui semakin bertambahnya jumlah hotel dan jasa perjalanan wisata di Provinsi DKI Jakarta selama lima tahun terakhir. Namun potensi yang tinggi tersebut masih kurang dimanfaatkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta sebagaimana terlihat pada Tabel 1.3 dan 1.4 yang menunjukkan bahwa selama 9 tahun terakhir kontribusi penerimaan PAD industri pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta masih cenderung kecil apabila dibandingkan dengan kontribusi industri non pariwisata. Oleh karena itu, perlu diadakan studi mengenai penerimaan daerah dari industri pariwisata untuk mengetahui apakah faktor-faktor seperti jumlah wisnus dan wisman, investasi di industri pariwisata, nilai kurs (US

dollar), serta faktor keamanan mempengaruhi penerimaan daerah dari industri pariwisata agar memperoleh jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada.

Adapun pertanyaan penelitian yang akan dibahas adalah:

1. Apakah jumlah wisnus dan wisman mempengaruhi penerimaan daerah dari industri pariwisata di Provinsi DKI Jakarta?
2. Apakah investasi di industri pariwisata mempengaruhi penerimaan daerah dari industri pariwisata di Provinsi DKI Jakarta?
3. Apakah nilai kurs (US dollar) mempengaruhi penerimaan daerah dari industri pariwisata di Provinsi DKI Jakarta?
4. Apakah faktor keamanan mempengaruhi penerimaan daerah dari industri pariwisata di Provinsi DKI Jakarta?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Menganalisis pengaruh jumlah wisnus dan wisman terhadap penerimaan daerah dari industri pariwisata di Provinsi DKI Jakarta
2. Menganalisis pengaruh investasi di industri pariwisata terhadap penerimaan daerah dari industri pariwisata di provinsi DKI Jakarta
3. Menganalisis pengaruh nilai kurs (UD dollar) terhadap penerimaan daerah dari industri pariwisata di provinsi DKI Jakarta
4. Menganalisis pengaruh faktor keamanan terhadap penerimaan daerah dari industri pariwisata di provinsi DKI Jakarta.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada:

1. Pengambil Kebijakan

Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna dalam menentukan kebijakan yang tepat guna meningkatkan penerimaan daerah dari industri pariwisata

2. Ilmu Pengetahuan

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian yang lain. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yaitu dapat menambah kajian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan daerah dari industri pariwisata.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang terdiri dari: Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, serta Bab V Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Menguraikan Latar Belakang Masalah Penelitian, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan Landasan Teori, Hubungan antar Variabel Independen terhadap Variabel Dependen, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran Teoritis, dan mencoba menarik suatu Hipotesis Penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Menguraikan Variabel Penelitian dan Definisi Operasional, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, serta Metode Analisis Data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menguraikan Analisis Deskriptif dan Objek Penelitian, Analisis Data, Pengujian Hipotesis, dan Pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan Kesimpulan dan Keterbatasan dari penelitian dan Saran-Saran.

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Landasan Teori**

**2.1.1 Penerimaan**

Lipsey and Steiner (1985) menyatakan bahwa pendapatan total (TR) adalah jumlah total yang diterima oleh penjual. Jika  $q$  unit dijual dengan harga  $p$  untuk tiap unit, maka  $TR = p \cdot q$ . (Titik antara  $p$  dan  $q$  berarti kali). Menurut Case and Fair (2007) penerimaan total (TR-total revenue) adalah jumlah total yang didapatkan perusahaan dari penjualan produknya. Oleh sebab itu, penerimaan total adalah harga per unit dikalikan dengan kuantitas output yang diputuskan akan diproduksi oleh perusahaan.

Penerimaan total = harga  $\times$  kuantitas

$$TR = P \times q \dots\dots\dots(2.1)$$

**2.1.2 Penerimaan Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pendapatan daerah bersumber dari: (a) pendapatan asli daerah, (b)

danaperimbangan, (c) lain-lain pendapatan. Sedangkan pembiayaan bersumber dari: (a) sisa lebih perhitungan anggaran daerah, (b) penerimaan pinjaman daerah, (c) dana cadangan daerah, (d) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

### 2.1.3 Penerimaan Pariwisata

Penerimaan pariwisata dalam penelitian ini adalah pembayaran atas layanan yang diberikan oleh perusahaan atau tempat usaha yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh wisatawan, khususnya dapat dilihat dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) industri pariwisata yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, retribusi vila/pesanggrahan, serta retribusi tempat rekreasi.

$$2) \quad TR_{wisata} = P \cdot Q \dots \dots \dots (2.1)$$

$$3) \quad TR_{wisata} = P \cdot f(Q) \dots \dots \dots (2.2)$$

$$TR_{wisata} = P \cdot f (\sum \text{objek hotel} + \text{objek restoran} + \text{objek hiburan} + \text{retribusi pesanggrahan/villa} + \text{retribusi tempat rekreasi} \dots \dots \dots (2.4)$$

Dimana :

$TR_{wisata}$  = pajak dan retribusi

$P$  : Pajak = tarif pajak

Retribusi = tarif retribusi

$Q$  : Objek pajak dan objek retribusi

#### **2.1.4 Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa :

1. PAD bersumber dari :
  - a. pajak daerah
  - b. retribusi daerah
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah sah
2. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
  - a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
  - b. jasa giro
  - c. pendapatan bunga
  - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

- e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

## **2.1.5 Pajak Daerah**

### **2.1.5.1 Pengertian Pajak Daerah**

Menurut Undang - Undang Nomor 34 tahun 2000 pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

1. Jenis pajak Propinsi terdiri dari:

- Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

2. Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- Pajak Parkir

### 2.1.5.2 Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

#### a) Pengertian

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel disini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

#### b) Objek pajak Hotel

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk pelayanan sebagaimana di bawah ini:

- 1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain: gubuk pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (Hostel), losmen dan rumah penginapan.

- 2) Pelayanan penunjang, antara lain : telepon, faksimile, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, sertrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
  - 3) Fasilitas olahraga dan hiburan khusus untuk tamu hotel antara lain: pusat kebugaran (*fitness center*), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau disediakan oleh hotel.
  - 4) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
- c) Subjek pajak dan wajib pajak hotel

Pada pajak hotel, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara itu yang menjadi wajib pajak hotel adalah pengusaha hotel.

- d) Tarif pajak hotel

Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

### **2.1.5.3 Pajak Restoran**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta adalah sebagai berikut:

- a) Pengertian

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pengenaan pajak restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang

ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak restoran di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

b) Objek pajak restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Yang termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya. Pelayanan di restoran/rumah makan meliputi penjualan makanan dan atau minuman di restoran/rumah makan, termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang.

c) Subjek pajak dan wajib pajak restoran.

Pada pajak restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran. Sementara itu yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang

rumah makan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada pajak restoran tidak sama.

d) Tarif pajak restoran

Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### **2.1.5.4 Pajak Hiburan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah sebagai berikut:

a) Pengertian

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, pajak hiburan dapat diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.

b) Objek Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran. Yang dimaksud hiburan antara lain berupa tontonan film, kesenian, pagelaran musik dan tari, diskotik, karaoke, klub malam, permainan biliar, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap, pertandingan olahraga. Dengan demikian, objek pajak hiburan meliputi: pertunjukan film, pertunjukan kesenian, pertunjukan pagelaran, penyelenggaraan diskotik dan sejenisnya, penyelenggaraan tempat-tempat

wisata dan sejenisnya pertandingan olahraga, pertunjukan dan keramaian umum lainnya.

c) Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan

Pada pajak hiburan subjek pajak adalah konsumen yang menikmati hiburan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada pajak hiburan tidak sama.

d) Tarif pajak hiburan

Tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### 2.1.5.5 Fungsi Pajak

Fungsi pajak ada dua, yaitu sebagai berikut:

1. *Fungsi Penerimaan (Budgeter)*, yakni sebagai alat atau sumber untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara (pengeluaran rutin dan pembangunan).
2. *Fungsi Mengatur (Reguler)*, yakni sebagai alat untuk mengatur guna tercapainya tujuan-tujuan tertentu yang ditetapkan pemerintah. Pajak, seperti *custom duties/tariff* (bea masuk), digunakan untuk mendorong atau melindungi (memproteksi) produksi dalam negeri, khususnya untuk melindungi *infant industry* dan atau industri-industri yang dinilai strategis oleh pemerintah. Selain itu, pajak juga dapat digunakan justru untuk menghambat atau mendistorsi suatu kegiatan perdagangan.

Misalnya di saat terjadi kelangkaan minyak goreng, pemerintah mengenakan pajak ekspor yang tinggi guna membatasi atau mengurangi ekspor kelapa sawit. Pemerintah juga mengenakan *excise* (cukai) terhadap barang dan atau jasa tertentu yang mempunyai eksternalitas negatif dengan tujuan mengurangi atau membatasi produksi dan konsumsi barang dan atau jasa tersebut.

## **2.1.6 Retribusi Daerah**

### **2.1.6.1 Pengertian Retribusi Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2012, retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

### **2.1.6.2 Jenis-Jenis Retribusi Daerah:**

Jenis retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1) Retribusi Jasa Umum

Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah:

- a) Retribusi pelayanan kesehatan
- b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- c) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte cacatan sipil
- d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- e) Retribusi pelayanan pasar
- f) Retribusi pengujian kendaraan bermotor

- g) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
  - h) Retribusi penggantian biaya cetak peta
  - i) Retribusi penyediaan dan penyedotan kakus
  - j) Retribusi pengolahan limbah cair
  - k) Retribusi pelayanan tera/tera ulang
  - l) Retribusi pelayanan pendidikan
  - m) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi
- 2) Retribusi Jasa Usaha

Jenis retribusi Jasa Usaha adalah:

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
- c) Retribusi tempat pelelangan
- d) Retribusi terminal
- e) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
- f) Retribusi rumah potong hewan
- g) Retribusi pelayanan kepelabuhan
- h) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- i) Retribusi penyebrangan di air
- j) Retribusi penjualan produksi usaha daerah

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

- a) Retribusi izin mendirikan bangunan

- b) Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol
- c) Retribusi izin trayek

### **2.1.6.3 Objek Retribusi Daerah**

Objek retribusi daerah terdiri dari:

- 1) Jasa umum yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 2) Jasa usaha yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
- 3) Perizinan tertentu yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

### **2.1.6.4 Subjek Retribusi Daerah**

Subjek retribusi daerah:

- 1) Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- 2) Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

- 3) Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

## **2.1.7 Kepariwisataan**

### **2.1.7.1 Pariwisata**

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati suatu destinasi. Unsur yang terpenting dalam kegiatan wisata adalah tidak bertujuan untuk mencari nafkah, tetapi apabila di sela-sela kegiatan mencari nafkah itu juga secara khusus dilakukan kegiatan wisata, bagian dari kegiatan tersebut dianggap sebagai kegiatan wisata.

Yoeti (1996:10) menyebutkan wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Wisata adalah berpergian bersama-sama untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang, dsb.

Undang-undang Nomor 10 tahun 2009, menyebutkan pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata, dengan demikian pariwisata meliputi:

- 1) Semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata
- 2) Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata seperti: kawasan wisata, taman rekreasi, kawasan peninggalan sejarah, museum, waduk, pagelaran seni

budaya, tata kehidupan masyarakat atau yang bersifat alamiah: keindahan alam, gunung berapi, danau, pantai

- 3) Pengusahaan jasa dan sarana pariwisata yaitu: usaha jasa pariwisata (biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, pramuwisata, konvensi, perjalanan insentif dan pameran, impresariat, konsultan pariwisata, informasi pariwisata), usaha sarana pariwisata yang terdiri dari akomodasi, rumah makan, bar, angkutan wisata.

Spillane dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya (1987:21)*, mengemukakan bahwa pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan secara perorangan maupun kelompok, sebagai usaha untuk mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya juga alam dan ilmu.

#### **2.1.7.2 Industri**

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Dari pengertian industri tersebut, istilah industri sering disebut sebagai kegiatan manufakturing, padahal pengertian industri tidak hanya berkenaan dengan itu saja, tetapi industri juga menyangkut dengan semua kegiatan manusia pada bidang ekonomi yang bersifat produktif dan komersial. Oleh karena kegiatan ekonomi yang luas maka cara penggolongan atau pengklasifikasian industri pun

berbeda-beda. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 19/M/I/1986 yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan, pengklasifikasian industry adalah sebagai berikut:

a. Industri Kimia Dasar (IKD)

Industri kimia dasar merupakan industri yang memerlukan modal yang besar, keahlian yang tinggi, dan menerapkan teknologi maju. Adapun industri yang termasuk kelompok IKD yaitu, industri kimia organik, industri kimia anorganik, industri agrokimia, industri selulosa dan karet.

b. Industri Mesin Logam Dasar dan Elektronika (IMELDE)

Industri ini merupakan industri yang mengolah bahan mentah logam menjadi mesin-mesin berat atau rekayasa mesin dan perakitan. Adapun yang termasuk industri ini, yaitu industri mesin dan perakitan alat-alat pertanian, industri alat-alat berat/konstruksi, industri mesin perkakas, industri elektronika, industri mesin listrik, industri kereta api, industri otomotif, industri pesawat, industri logam dan produk dasar, industri perkapalan, industri mesin dan peralatan pabrik.

c. Aneka Industri (AI)

Industri ini merupakan industri yang tujuannya menghasilkan bermacam-macam barang kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun yang termasuk industri ini yaitu, industri tekstil, industri alat listrik dan logam, industri kimia, industri pangan, industri bahan bangunan dan umum.

d. Industri Kecil (IK)

Industri ini merupakan industri yang bergerak dengan jumlah pekerja sedikit, dan teknologi sederhana. Biasanya dinamakan industri rumah tangga, seperti: industri kerajinan, industri alat-alat rumah tangga, dan perabotan dari tanah (gerabah).

e. Industri Pariwisata

Industri ini merupakan industri yang menghasilkan nilai ekonomis dari kegiatan wisata. Bentuknya bisa berupa wisata seni dan budaya, wisata pendidikan, wisata alam, dan wisata kota.

### **2.1.7.3 Industri Pariwisata**

Pengertian industri pariwisata disini lebih cenderung memberikan pengertian bahwa industri pariwisata merupakan kumpulan perusahaan yang secara bersama-sama menghasilkan barang dan jasa (*goods and service*) yang dibutuhkan oleh para wisatawan. Berdasarkan Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009, industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Menurut W. Hunziker (Yoeti, 1994:38) Industri pariwisata adalah “*Tourism enterprises are all business entities which, by combining various means of production, provide goods and services of a specially tourist nature*”. Maksudnya industri pariwisata adalah semua kegiatan usaha yang terdiri dari bermacam-macam kegiatan produksi barang dan jasa yang diperlukan para wisatawan.

Menurut GA. Schmoll (Yoeti, 1985:143) industri pariwisata lebih cenderung berorientasi dengan menganalisa cara-cara melakukan pemasaran dan promosi hasil produk industri pariwisata. Industri pariwisata bukanlah industri yang berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu industri yang terdiri dari serangkaian perusahaan yang menghasilkan jasa-jasa atau produk yang berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu tidak hanya dalam jasa yang dihasilkan tetapi juga dalam besarnya perusahaan, lokasi atau tempat kedudukan, letak secara geografis, fungsi, bentuk organisasi yang mengelola dan metode permasalahannya. Sedangkan menurut Damarji (Yoeti, 1996:154) industri pariwisata adalah rangkuman dari berbagai usaha yang secara bersama-sama menghasilkan produk-produk dan service yang nantinya secara langsung akan dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanan.

## **2.1.8 Wisatawan dan Hubungan Jumlah Wisatawan dengan Penerimaan Daerah dari Industri Pariwisata**

### **2.1.8.1 Wisatawan**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. Menurut Inpres No. 9/1969, yang dimaksud dengan wisatawan adalah setiap orang yang berpergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain dengan menikmati kunjungan tersebut. Menurut Soekadijo dalam Firsti Saputri Anggraini (2004) menjelaskan bahwa wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap di tempat yang didatanginya (hanya untuk sementara waktu tinggal di tempat tersebut).

Sedangkan yang dimaksud wisatawan menurut Spillane (1987) adalah setiap orang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.

Jadi pada dasarnya, semua orang yang melakukan perjalanan wisata dinamakan wisatawan. Apapun tujuannya yang penting, perjalanan itu bukan untuk menetap dan tidak untuk mencari nafkah ditempat yang dikunjungi. Jumlah wisatawan berarti total orang yang melakukan perjalanan wisata pada periode waktu tertentu. Wisatawan dapat berasal dari dalam negeri atau yang dikenal dengan sebutan wisatawan nusantara dan adapula wisatawan yang berasal dari luar negeri tujuan yang disebut dengan wisatawan mancanegara.

#### **2.1.8.2 Hubungan Jumlah Wisatawan dengan Penerimaan Daerah dari**

##### **Industri Pariwisata**

Menurut Spillane (1987), industri pariwisata mempunyai beberapa sifat khusus, salah satunya yaitu produksi dan konsumsi terjadi pada waktu yang bersamaan. Tanpa wisatawan yang sedang menggunakan jasa wisata itu tidak akan terjadi kegiatan produksi wisata. Sehingga keberadaan wisatawan mutlak diperlukan untuk bisa menciptakan pendapatan pada kegiatan perekonomian daerah tujuan wisata yang nantinya akan membantu dalam peningkatan pengembangan dan pembangunan daerah setempat.

Secara teoritis, semakin banyak jumlah wisatawan dan semakin lamawisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut, paling sedikit untuk

keperluanmakan, minum dan penginapan selama tinggal di daerah tersebut. Berbagai macam kebutuhan wisatawan selama perjalanan wisatanya akan menimbulkan gejala konsumtif untuk produk-produk yang ada di daerah tujuan wisata. Dengan adanya kegiatan konsumtif baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik, maka akan memperbesar pendapatan yang diterima oleh pemilik usaha di industri pariwisata dari pembayaran atas pelayanan yang diterima oleh wisatawan yang nantinya akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan retribusi bagi pemerintah daerah tujuan wisata setempat yang notabene merupakan komponen dari PAD industri pariwisata. Misalnya, pajak atas pelayanan hotel, restoran, hiburan ataupun retribusi di industri pariwisata. Oleh karena itu, semakin tingginya arus kunjungan wisatawan ke Provinsi DKI Jakarta, maka akan meningkatkan penerimaan daerah dari industri pariwisata di Provinsi DKI Jakarta.

## **2.1.9 Investasi di Industri Pariwisata dan Hubungan Investasi di Industri Pariwisata dengan Penerimaan Daerah dari Industri Pariwisata**

### **2.1.9.1 Investasi Di Industri Pariwisata**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, definisi penanaman modal (investasi) adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 UU Nomor 25 Tahun 2007 dijelaskan bahwa investasi terbagi menjadi dua, yaitu PMDN dan PMA yang dapat didefinisikan sebagai berikut, penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha

di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan penanaman modal asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Menurut Sadono Sukirno (2004) investasi merupakan pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Sedangkan menurut Case and Fair (2007), investasi adalah aliran yang meningkatkan persediaan modal. Meskipun modal diukur pada titik waktu tertentu (suatu persediaan), investasi diukur atas periode waktu (suatu aliran). Aliran investasi meningkatkan persediaan (simpanan) modal.

Investasi menghimpun akumulasi modal dengan membangun sejumlah gedung, peralatan ataupun berbagai kegiatan usaha yang berguna bagi kegiatan produktif, maka output potensial suatu Negara atau lebih khususnya dalam hal ini daerah akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang juga akan meningkat. Dapat disimpulkan bahwa investasi memiliki peranan penting dalam menentukan jumlah output dan pendapatan.

Dalam hal ini di dasarkan atas model pertumbuhan Harrod-Domar, yang secara jelas menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan GDP ( $\Delta Y/Y$ ) ditentukan secara bersama-sama oleh rasio tabungan nasional,  $s$ , serta rasio modal-output

nasional,  $k$ . Sederhananya, agar bisa tumbuh dengan pesat, setiap perekonomian harus menabung dan menginvestasikan sebanyak mungkin bagian dari GDP-nya. Semakin banyak yang ditabung dan kemudian diinvestasikan, maka laju pertumbuhan perekonomian akan semakin cepat (Todaro, 2006).

Persamaan dalam model ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{S}{k} \dots \dots \dots (2.5)$$

Dimana fungsi tabungan atau investasi dinyatakan sebagai berikut:

$$S = sY \text{ dan } S = I = \Delta K \dots \dots \dots (2.6)$$

Dalam penelitian ini yang dimaksudkan investasi di industri pariwisata adalah realisasi investasi baik PMDN ataupun PMA yang ditanamkan dalam kegiatan usaha yang berkaitan dengan industri pariwisata, yaitu investasi pada jasa agen perjalanan, hotel bintang, restoran dan penyediaan makanan keliling, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, jasa biro perjalanan wisata, kegiatan hiburan, serta kegiatan kesenian dan kreativita.

### **2.1.9.2 Hubungan Investasi di Industri Pariwisata dengan Penerimaan**

#### **Daerah dari Industri Pariwisata**

Penanaman modal (investasi) merupakan langkah awal proses produksi. Dengan posisi semacam itu, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal pembangunan ekonomi. Dinamika investasi mempengaruhi tinggi rendahnya suatu sektor ekonomi. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap Negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tetapi juga investor asing (Dumairy, 1996).

Pertumbuhan industri pariwisata salah satunya diukur dengan besarnya investasi yang ditanamkan pada industri tersebut. Jenis-jenis investasi pada industri pariwisata dibagi menjadi tiga, yaitu investasi modal pribadi, investasi pemerintah, dan investasi swasta. Investasi modal pemerintah cenderung terkait dengan pembangunan prasarana transportasi (bandara, pelabuhan, jalan) dan pusat-pusat konvensi. Investasi modal pribadi biasanya diwujudkan dalam bentuk sarana akomodasi non hotel, sedangkan investasi swasta cenderung berupa sarana akomodasi hotel dan transportasi (Fitri Saputri Anggraini, 2004).

Begitu juga dengan investasi di industri pariwisata, salah satunya yaitu investasi pada usaha perhotelan yang diharapkan mampu mengembangkan pembangunan atau pendirian hotel-hotel baru atau pengadaan kamar-kamar pada hotel-hotel yang sudah ada. Dengan tersedianya hotel yang memadai, para wisatawan tidak segan untuk berkunjung ke suatu daerah, terlebih jika hotel tersebut nyaman untuk disinggahi. Sehingga mereka akan merasa lebih aman, nyaman dan betah untuk tinggal lebih lama di daerah tujuan wisata. Pembayaran atas pelayanan hotel yang diterima oleh wisatawan akan meningkatkan pendapatan usaha perhotelan yang nantinya akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak hotel bagi pemerintah daerah tujuan wisata setempat yang notabene merupakan salah satu komponen dari PAD industri pariwisata. Dapat disimpulkan bahwa investasi di industri pariwisata berpengaruh secara tidak langsung terhadap penerimaan daerah dari industri pariwisata.

Oleh karena itu, industri pariwisata terutama kegiatan yang berkaitan dengan penginapan yaitu hotel, baik berbintang maupun melati akan

memperoleh pendapatan yang semakin meningkat apabila para wisatawan berkunjung dan menginap sehingga hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah dari industri pariwisata. Hal ini tidak hanya berlaku pada investasi usaha perhotelan saja, melainkan pada investasi di industri pariwisata lainnya.

## **2.1.10 Nilai Kurs USD dan Hubungan Nilai Kurs USD dengan Penerimaan Daerah dari Industri Pariwisata**

### **2.1.10.1 Nilai Kurs USD**

Menurut Parikesit dan Trisnadi (1997) model prediksi target pariwisata Indonesia berupa kedatangan wisman sangat ditentukan oleh perbedaan harga antara Negara asal dan Negara tujuan. Kurs antara dua Negara adalah harga dimana penduduk kedua Negara saling melakukan perdagangan (Mankiw, 2000). Kurs dibedakan menjadi dua yaitu kurs riil dan kurs nominal.

- 1) Kurs riil adalah harga relatif barang-barang kedua Negara
- 2) Kurs nominal adalah harga relatif mata uang suatu Negara terhadap mata uang Negara lain

Penentuan kurs valuta asing dapat dibedakan menjadi dua sistem, yaitu sebagai berikut (Sadono Sukirno, 2007) :

#### a) Sistem kurs tetap

Sistem kurs tetap adalah sistem penentuan nilai mata uang asing dimana bank sentral menetapkan harga berbagai mata uang asing tersebut dan harga tersebut tidak diubah dalam jangka masa yang lama.

b) Sistem kurs fleksibel (mengambang)

Sistem kurs fleksibel adalah nilai mata uang asing yang ditetapkan berdasarkan perubahan permintaan dan penawaran di pasaran valuta asing dari hari ke hari.

Lipsey and Steiner (1990) dalam bukunya "*Pengantar Makroekonomi*" menjelaskan bahwa terdapat satu lagi cara untuk menentukan kurs valuta asing, yaitu dengan menggunakan sistem mengambang terkendali. Pada sistem ini bank sentral bebas menyesuaikan sasaran nilai tukar mereka pada saat lingkungan berubah. Terkadang mereka membiarkan nilai tukar bebas bergerak, dan di waktu lain mereka campur tangan secara aktif untuk mengubah nilai tukar dari nilai yang ditentukan oleh pasar terbuka.

Sejak tahun 1970, Negara Indonesia telah menerapkan tiga sistem nilai tukar, yaitu (Octaviana Ana, 2007) dalam Fajar Febriananda (2011):

1. Sistem kurs tetap (1970 - 1978)
2. Sistem mengambang terkendali (1978 – Juli 1997)
3. Sistem kurs mengambang (14 Agustus 1997 – sekarang)

Dalam sistem kurs valuta asing fleksibel, depresiasi atau apresiasi mata uang akan mengakibatkan perubahan ke atas ekspor maupun impor, sebagai berikut: (i) *depresiasi sesuatu mata uang cenderung menaikkan ekspor dan mengurangi impor, sebaliknya* (ii) *apresiasi mata uang cenderung untuk mengurangi ekspor dan menambah impor* (Sadono Sukirno, 2007). Ekspor dalam hal ini tertuju pada industri pariwisata yang biasa disebut dengan *invisible export*.

### **2.1.10.2 Hubungan Nilai Kurs USD dengan Penerimaan Daerah dari Industri**

#### **Pariwisata**

Pada saat membicarakan kurs antara dua Negara maka yang dimaksud adalah kurs nominal. Kurs antara dua Negara dihitung dari kurs nominal dan rasio tingkat harga di kedua Negara. Namun, perhitungan maupun analisis data yang berkaitan dengan waktu dan nilai mata uang sebaiknya menggunakan data yang sifatnya riil karena data riil artinya sudah memperhitungkan inflasi. Selanjutnya, pada saat membicarakan kurs dalam penelitian ini maka yang dimaksud adalah kurs riil.

Sebagai contoh, nilai kurs Rp/USD sebesar 8000, berarti bahwa untuk membeli 1 USD diperlukan Rp.8000 (Firsti Saputri Anggarini, 2004). Penurunan kurs antara Rupiah dan USD (misalnya, dari Rp.8000/USD menjadi Rp.9000/USD) berarti Dollar menjadi lebih mahal dalam nilai Rupiah. Ini mencerminkan bahwa nilai Dollar naik karena jumlah Rupiah yang diperlukan untuk membeli Dollar meningkat. Dengan kata lain, Dollar mengalami apresiasi terhadap Rupiah.

Dari sisi lain, Rupiah menjadi lebih murah dinilai dalam Dollar, artinya Rupiah mengalami depresiasi terhadap Dollar. Untuk menghindari kebingungan, harus diingat bahwa kurs valuta asing merupakan jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing (Sadono Sukirno, 2004).

Dalam hal ini jika nilai rupiah menguat maka akan meningkatkan harga pariwisata Indonesia yang berakibat pada penurunan jumlah kunjungan wisman. Dengan berkurangnya jumlah kunjungan wisman maka kegiatan konsumsi produk-produk di daerah tujuan wisata pun ikut menurun, sehingga pembayaran atas pelayanan yang diterima oleh wisman akan menurunkan pendapatan pemilik usaha di industri pariwisata, yang pada akhirnya akan menurunkan jumlah penerimaan pajak atau retribusi bagi pemerintah daerah tujuan wisata setempat, dimana pajak dan retribusi merupakan bagian dari PAD industri pariwisata. Sebaliknya, saat rupiah melemah, harga pariwisata Indonesia menjadi menurun dan jumlah kunjungan wisman serta pengeluarannya akan meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan daerah dari industri pariwisata. Secara tidak langsung nilai kurs USD mempengaruhi jumlah penerimaan daerah dari industri pariwisata.

### **2.1.11 Faktor Keamanan dan Hubungan Faktor Keamanan dengan Penerimaan Daerah dari Industri Pariwisata**

#### **2.1.11.1 Faktor Keamanan**

Menurut Abdul-Monem (1985) dalam Rizal Sukma (2002) konsep keamanan dibagi menjadi dua aliran besar, yakni antara definisi strategis dan definisi non-strategis ekonomi. Definisi yang pertama umumnya menempatkan “keamanan” sebagai nilai abstrak, terfokus pada upaya mempertahankan independensi dan kedaulatan Negara, dan umumnya berdimensi militer. Sementara, definisi kedua terfokus pada penjagaan terhadap sumber-sumber ekonomi dan aspek non-militer dari fungsi Negara. Secara sederhana,

keamanan didefinisikan sebagai keadaan bebas dari segala macam bentuk bahaya, kecemasan, dan ketakutan.

#### **2.1.11.2 Hubungan Faktor Keamanan dengan Penerimaan Daerah dari**

##### **Industri Pariwisata**

Faktor keamanan (*safety*) merupakan faktor luar utama yang mempengaruhi bentuk permintaan pariwisata. Situasi yang tidak aman dapat memunculkan kesan kurang baik terhadap suatu daerah dan Negara pada umumnya (Yoeti, 1996). Hal itu dapat berpengaruh terhadap motivasi melakukan perjalanan ke suatu tempat di daerah atau Negara tersebut.

Dummy yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu faktor keamanan, diambil dengan pertimbangan dalam kurun waktu penelitian kondisi Indonesia diwarnai dengan banyaknya isu keamanan nasional dan gejolak politik seperti peristiwa peledakan bom di Bali sebagai bagian dari aksi terorisme di Indonesia dan banyaknya gejolak politik yang tidak stabil seperti demonstrasi menentang pemerintahan sampai pergantian presiden yang sangat mempengaruhi keadaan sosial dan ekonomi Indonesia serta reaksi masyarakat internasional.

Hal ini akan menimbulkan persepsi negatif dan memunculkan kesan bahwa Indonesia khususnya Provinsi DKI Jakarta tidak aman untuk dikunjungi sehingga akan menurunkan motivasi kunjungan wisata. Reaksi yang muncul antara lain berupa pembatalan perjalanan dan penundaan keputusan untuk berpergian. Oleh karena itu faktor keamanan ini diduga berpengaruh negatif pada saat kondisi tidak aman terhadap penurunan penerimaan daerah dari industri

pariwisata melalui penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi DKI Jakarta.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

- **Syamsul Huda (2009); Analisis Penerimaan Devisa Sektor Pariwisata dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi di Provinsi Jawa Timur**

Dalam penelitian terdahulu oleh Syamsul Huda, mahasiswa Fakultas Ekonomi UPN “Veteran” Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi devisa sektor pariwisata di Provinsi Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan variable jumlah wisatawan, jumlah objek wisata, jumlah hotel, biro perjalanan, rata-rata lama tinggal, rata-rata pengeluaran wisatawan dan kurs Dollar AS sebagai variable independen sedangkan penerimaan devisa sektor pariwisata sebagai variable dependen. Dari pengujian hipotesis dengan uji F dinyatakan bahwa secara simultan semua variable independen berpengaruh signifikan terhadap variable dependen. Sedangkan dari pengujian hipotesis dengan t dinyatakan bahwa variable bebas yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan devisa sektor pariwisata hanya variable jumlah objek wisata.

- **Firsti Saputri Anggraini (2004); Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di DKI Jakarta**

Dalam penelitian terdahulu oleh Fitri Saputri Anggraini (2004), mahasiswi Fakultas Ekonomi Institut Pertanian Bogor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di DKI Jakarta. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan jumlah kunjungan wisman (Y) sebagai variabel dependen dan investasi sektor perhotelan (X1), jumlah biro perjalanan wisata (X2), nilai tukar (X3), dan faktor keamanan (X4) sebagai variabel independen. Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yang diduga berpengaruh nyata secara bersama-sama terhadap variabel dependen pada taraf nyata 0,01 sehingga model tersebut layak untuk menduga parameter jumlah kunjungan wisman dengan tingkat kepercayaan sebesar 99 persen. Berdasarkan uji t, investasi sektor perhotelan dan jumlah biro perjalanan wisata berpengaruh positif terhadap jumlah kunjungan wisman pada taraf nyata 0,01 dan kondisi keamanan berpengaruh pada taraf nyata 0,05 dengan arah negative pada saat kondisi tidak aman. Sedangkan variabel nilai tukar tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah kunjungan wisman.

- **Arief Hartoko (2009); Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Pendapatan Daerah Dari Sektor Pariwisata Di Kotamadya Malang**

Dalam penelitian terdahulu oleh Arief Hartoko (2009), mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah wisatawan, investasi sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, rata-

rata lama tinggal wisatawan mancanegara terhadap pendapatan daerah di Kota Malang. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan pendapatan daerah dari sektor pariwisata (Y) sebagai variable dependen dan jumlah wisatawan ( $X_1$ ), investasi sarana pariwisata ( $X_2$ ), usaha jasa pariwisata ( $X_3$ ), rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara ( $X_4$ ) sebagai variable independen. Dari hasil perhitungan analisis data dan pengujian hipotesis secara simultan diperoleh hasil  $F_{hitung} = 136,269 > F_{tabel} = 5,19$ , berarti variabel  $X_1, X_2, X_3$ , dan  $X_4$  secara simultan berpengaruh nyata terhadap variable Y. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat telah terbukti. Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial variable  $X_1$  tidak berpengaruh nyata dan positif terhadap variable Y, variable  $X_2$  dan  $X_3$  berpengaruh nyata dan positif terhadap variable Y sedangkan variable  $X_4$  tidak berpengaruh nyata terhadap variable Y.

- **Nasrul Qadarrochman (2010); Analisis Penerimaan Daerah Dari Sektor Pariwisata di Kota Semarang Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya.**

Dalam penelitian terdahulu oleh Nasrul Qadarrochman (2010), mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kota Semarang dan menganalisis faktor yang paling berpengaruh terhadap penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kota Semarang. Metode analisis yang digunakan dalam

penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan penerimaan daerah sektor pariwisata sebagai variabel dependen dan empat variabel independen yaitu variabel jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel dan pendapatan perkapita. Berdasarkan hasil perhitungan EViews 6 diperoleh nilai F hitung = 14,349 dengan signifikansi F sebesar 0.000. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 diperoleh nilai F tabel sebesar 2,31. Maka F hitung (14,349) > F tabel (2,61), atau signifikansi F sebesar 0,000 menunjukkan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa keempat variabel independen yaitu jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel dan pendapatan perkapita secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Kota Semarang diterima. Secara parsial variabel jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan dan tingkat hunian hotel berpengaruh signifikan. Sedangkan variabel pendapatan perkapita tidak signifikan. Dan dari keempat variabel tersebut yang paling dominan pengaruhnya terhadap penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kota Semarang adalah variabel jumlah obyek wisata. Dengan nilai t-hitung sebesar 4,407 dan probabilitas signifikansi sebesar 0,001.

- **I Nengah Wijaya (2011); Pengaruh Jumlah Wisatawan Mancanegara, Lama Tinggal, dan Kurs Dolar Amerika Terhadap Penerimaan Produk Domestik Regional Bruto Industri Pariwisata Kabupaten Badung Tahun 1997-2010**

Dalam penelitian terdahulu oleh I Nengah Wijaya (2011); mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah wisatawan mancanegara, lama tinggal dan kurs dollar Amerika terhadap penerimaan Produk Domestik Regional Bruto industry pariwisata Kabupaten Badung. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan PDRB industry pariwisata sebagai variabel dependen dan jumlah wisatawan mancanegara, lama tinggal, kurs dollar Amerika sebagai variabel independen. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara parsial jumlah wisatawan mancanegara dan kurs dollar Amerika berpengaruh nyata dan positif terhadap penerimaan PDRB industri pariwisata Kabupaten Badung, sedangkan lama tinggal berpengaruh tidak nyata terhadap penerimaan PDRB industri pariwisata Kabupaten Badung. Secara simultan jumlah wisatawan mancanegara, lama tinggal, dan kurs dollar Amerika berpengaruh nyata terhadap penerimaan PDRB industri pariwisata Kabupaten Badung.

**Tabel 2.2**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

<b>Nama dan Judul Penelitian</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Alat Analisis</b>	<b>Hasil</b>
Syamsul Huda (2009), Analisis Penerimaan Devisa Sektor Pariwisata dan Faktor-Faktor yang	Variabel Independen: Jumlah wisatawan, objek wisata, hotel, biro perjalanan, rata-	Regresi linear berganda	Dari hasil Uji t semua variabel kecuali objek wisata berpengaruh

Mempengaruhi di Provinsi Jawa Timur	rata lama tinggal, rata-rata pengeluaran wisatawan, kurs valuta asing Variabel Dependen: Penerimaan devisa sektor pariwisata		signifikan terhadap penerimaan devisa sektor pariwisata
Fitri Saputri Anggraini 2004, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di DKI Jakarta	Variabel Independen: Investasi sektor perhotelan, jumlah biro perjalanan wisata, faktor keamanan (dummy), nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah Variabel Dependen: Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di DKI Jakarta	Regresi linier berganda	Nilai tukar mata uang asing tidak berpengaruh. Investasi sektor perhotelan dan jumlah biro perjalanan wisata berpengaruh positif. Faktor keamanan berpengaruh negative.
Arief Hartoko 2009, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata di Kotamadya Malang	Variabel Independen: Jumlah wisatawan, investasi sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, rata-rata, lama tinggal wisatawan mancanegara Variabel Dependen:	Regresi linear berganda	Variabel jumlah wisatawan dan rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara tidak berpengaruh secara nyata dan positif, sedangkan variable investasi

	Pendapatan daerah dari sektor pariwisata		sarana pariwisata dan usaha jasa pariwisata berpengaruh secara nyata dan positif
Nasrul Qadarrochman 2010, Analisis Penerimaan Daerah Dari Sektor Pariwisata Di Kota Semarang Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya	Variabel Independen: Jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel, pendapatan perkapita Variabel Dependen: Penerimaan daerah sektor pariwisata	Regresi linier berganda	variabel jumlah obyek wisata, variabel jumlah wisatawan dan variabel tingkat hunian hotel dinyatakan signifikan semua, sedangkan variable pendapatan perkapita dinyatakan tidak signifikan
I Nengah Wijaya 2011, Pengaruh Jumlah Wisatawan Mancanegara, Lama Tinggal, dan Kurs	Variabel Independen: Jumlah wisatawan mancanegara, lama tinggal, kurs dollar Amerika Variabel Dependen: PDRB industri	Regresi Linear Berganda	Secara parsial jumlah wisatawan mancanegara, dan kurs dolar Amerika berpengaruh nyata dan positif ,

Dolar Amerika Terhadap Penerimaan Produk Domestik Regional Bruto Industri Pariwisata Kabupaten Badung Tahun 1997- 2010	pariwisata		sedangkan lama tinggal berpengaruh tidak nyata terhadap penerimaan Produk Domestik Regional Bruto industry pariwisata Kabupaten Bandung
--	------------	--	---

### 2.3 Kerangka pemikiran Teoritis

Pemberlakuan otonomi daerah yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pengembangan otonomi daerah yang luas dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya, termasuk pemberian kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan daerahnya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan penerimaan daerah dalam rangka membiayai jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di daerahnya.

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan mengoptimalkan potensi dalam industri pariwisata. Pariwisata merupakan salah

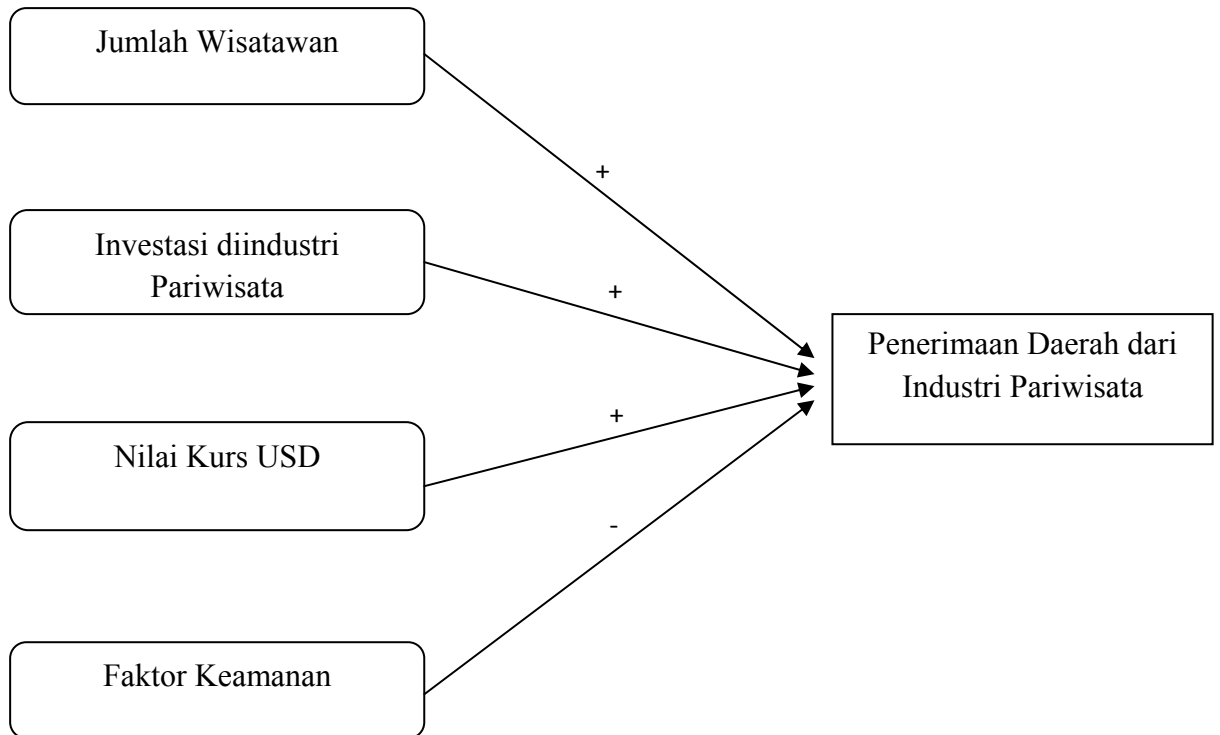
satu sumber pendapatan yang penting bagi suatu Negara atau lebih khusus lagi pemerintah daerah. Keterkaitan industri pariwisata dengan penerimaan daerah berjalan melalui jalur Pendapatan Asli Daerah (PAD) industri pariwisata. Dari segi ekonomi, pariwisata dapat memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah yang bersumber dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, retribusi daerah atau dapat mendatangkan devisa dari para wisatawan mancanegara yang berkunjung. Keberhasilan pengembangan industri kepariwisataan, berarti akan meningkatkan perannya dalam penerimaan daerah, dimana kepariwisataan merupakan komponen utamanya dengan memperhatikan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti: jumlah obyek wisata yang ditawarkan, jumlah wisatawan yang berkunjung baik domestik maupun mancanegara, tingkat hunian hotel, pendapatan perkapita, faktor keamanan, nilai kurs USD, serta investasi di industri pariwisata.

Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Ibukota dari Negara Republik Indonesia memiliki berbagai jenis wisata pilihan yang dapat dikunjungi wisatawan, mulai dari taman rekreasi, pusat-pusat perbelanjaan, event, wisata kuliner, wisata budaya dan wisata bahari. Sumbangan industri pariwisata Provinsi DKI Jakarta terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta selama Sembilan tahun terakhir cenderung lebih kecil daripada sumbangan industri non pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata 75,01 persen. Kontribusi terendah industri pariwisata terjadi pada tahun 2002 sebesar 11,13 persen dan terus mengalami peningkatan dan penurunan hingga kontribusi pariwisata tertinggi dapat dicapai pada tahun 2009 sebesar 15,45

persen. Kemudian kembali mengalami penurunan ditahun 2010 sebesar 14,48 persen. Hal ini menggambarkan bahwa industri pariwisata di Provinsi DKI Jakarta belum bisa memberikan kontribusi yang maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta karena nilai kontribusi industri pariwisata cenderung lebih kecil bila dibandingkan dengan kontribusi industri non pariwisata.

Walaupun industri pariwisata bukan menjadi industri yang mendapat prioritas utama dalam meningkatkan perekonomian daerah, namun industri pariwisata bisa menjadi industri yang sangat potensial dalam memperbaiki struktur ekonomi daerah, seharusnya dengan meningkatnya jumlah fasilitas penunjang pariwisata seperti penginapan dan jasa perjalanan pariwisata yang ditawarkan setiap tahunnya, jumlah pengunjung dan pendapatan sektor pariwisata di Provinsi DKI Jakarta juga dapat lebih ditingkatkan lagi, dengan demikian diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, perlu dianalisis apakah variabel jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara, investasi di industri pariwisata, nilai kurs USD, faktor keamanan berpengaruh terhadap penerimaan daerah dari industri pariwisata di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan alat analisis yaitu regresi linear berganda dengan pendekatan *OLS (Ordinary Least Square)*.

**Gambar 2.3**  
**Kerangka Pemikiran Teoritis**



#### **2.4 Hipotesis**

Berdasarkan uraian dan perumusan masalah di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel jumlah wisatawan diduga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan daerah dari industri pariwisata di Provinsi DKI Jakarta
2. Variabel investasi diindustri pariwisata diduga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan daerah dari industri pariwisata di Provinsi DKI Jakarta

3. Variabel nilai kurs USD diduga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan daerah dari industri pariwisata di Provinsi DKI Jakarta
4. Variabel faktor keamanan(*dummy*) diduga memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan daerah dari industri pariwisata di Provinsi DKI Jakarta

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Penelitian**

##### **3.1.1 Variabel Penelitian**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas, sedangkan variabel bebas adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Penelitian ini menggunakan lima variabel penelitian yaitu variabel penerimaan daerah dari industri pariwisata di Provinsi DKI Jakarta, variabel jumlah wisatawan, variabel investasi diindustri pariwisata, variabel nilai kurs USD dan variabel faktor keamanan.

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian:

1. Variabel bebas (*Independent Variable*) meliputi variabel jumlah wisatawan, variabel investasi diindustri pariwisata, variabel nilai kurs USD dan variabel faktor keamanan.
2. Variabel terikat (*Dependent Variable*) dalam penelitian ini adalah variabel penerimaan daerah dari industri pariwisata di Provinsi DKI Jakarta.

### 3.1.2 Definisi Operasional

Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur suatu variabel yang akan digunakan. Terdapat empat variabel bebas dan satu variabel terikat yang digunakan dalam analisis penerimaan daerah dari industri pariwisata di Provinsi DKI Jakarta.

Variabel-variabel dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Penerimaan daerah dari industri pariwisata

Penerimaan dari industri pariwisata terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa dan retribusi tempat rekreasi. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala kontinyu dengan satuan rupiah (Rp/tahun).

2. Jumlah wisatawan

Merupakan besarnya jumlah wisatawan baik mancanegara maupun nusantara yang berkunjung ke Provinsi DKI Jakarta (Orang/tahun).

3. Investasi di industri pariwisata

Investasi di industri pariwisata merupakan besarnya jumlah investasi baik PMDN maupun PMA yang bergerak pada kegiatan usaha jasa agen perjalanan, hotel bintang, restoran dan penyediaan makanan keliling, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, jasa biro perjalanan wisata, serta kegiatan hiburan, kesenian dan kreativita di Provinsi DKI Jakarta. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala kontinyu dengan satuan rupiah (Rp/tahun).

#### 4. Nilai kurs USD

Merupakan harga jual rupiah terhadap dollar US, dalam satuan rupiah per dollar US.

#### 5. Faktor keamanan

Faktor keamanan adalah variabel *dummy* yang merupakan representasi dari kondisi keamanan di Provinsi DKI Jakarta. Variabel *dummy* ini diberi nilai 0 untuk kondisi aman dan 1 untuk kondisi tidak aman. Suatu kondisi dikategorikan tidak aman apabila dalam kurun waktu satu tahun terdapat *travel warning* dari satu negara terhadap negara lain. *Travel warning* adalah larangan yang diberikan oleh pemerintah kepada warganya untuk tidak pergi ke suatu negara karena berbahaya. Dalam penelitian ini, kondisi keamanan Indonesia dikatakan tidak aman ketika ada lebih dari satu Negara memberikan *travel warning* ke Indonesia dalam kurun waktu satu tahun. Asumsi ini diterapkan karena dikhawatirkan jika hanya satu negara yang memberikan travel warning itu bisa disebabkan oleh adanya sentimen masyarakat internasional terhadap Indonesia. Berikut ini kondisi keamanan di Indonesia dari tahun 1991-2012:

- 1991-1997 : Aman (dummy = 0)
- 1998 : Tidak Aman (dummy = 1)  
Indonesia mendapat travel warning dari Amerika Serikat, Australia serta beberapa Negara Eropa lainnya akibat ketidakstabilan kondisi sosial, politik, dan ekonomi pada waktu itu (kerusuhan Mei 1998)
- 1999-2001 : Aman (dummy = 0)

- 2002-2008 : Tidak aman (dummy = 1)  
Berawal dari peristiwa Bom Bali I, Indonesia mendapat *travel warning* dari Australia, Amerika Serikat, Taiwan, Inggris, Jerman
- 2009-2012 : Aman (dummy = 0)

### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, baik dari literatur, studi pustaka, atau penelitian-penelitian sejenis sebelumnya yang berkaitan dalam penelitian ini.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan literatur-literatur lainnya seperti buku-buku, dan jurnal-jurnal ekonomi. Data yang digunakan antara lain adalah jumlah wisatawan baik nusantara maupun mancanegara, investasi diindustri pariwisata, nilai kurs USD, faktor keamanan, dan pendapatan asli daerah dari industri pariwisata di Provinsi DKI Jakarta tahun 1991-2012. Penentuan periode penelitian didasarkan pada berlakunya UU No 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata dimana hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia mulai memperhatikan perkembangan pariwisata secara lebih khusus sehingga hal ini ikut mempengaruhi dinamika pariwisata yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Disamping itu, selama tahun 1990-2012 situasi politik dan keamanan di Indonesia cenderung berada pada kondisi tidak aman yang bisa mempengaruhi perkembangan pariwisata di Indonesia, khususnya

Provinsi DKI Jakarta yang berkedudukan sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat, dan realistis. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode studi pustaka, yang diperoleh dari instansi-instansi terkait, buku referensi, maupun jurnal-jurnal ekonomi.

Data yang digunakan adalah data time series yaitu data runtut waktu yang merupakan data yang dikumpulkan, dicatat, atau diobservasi sepanjang waktu secara berurutan, dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

### **3.4 Metode Analisis Data**

#### **3.4.1 Uji Asumsi Klasik**

Agar dapat menggunakan analisis regresi linear berganda dengan pendekatan *ordinary least square (OLS)* maka model persamaan harus terbebas dari asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas uji Heteroskedastisitas, uji Autokorelasi, uji Multikolinearitas, dan uji Normalitas.

##### **3.4.1.1 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi apabila variabel gangguan tidak

mempunyai varian yang sama untuk semua observasi. Akibat adanya heteroskedastisitas, penaksir OLS tidak bias tetapi tidak efisien (Gujarati, 2003).

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, dapat diketahui dengan melihat penyebaran data pada *scatterplot* atau dengan melakukan uji park (*Park Test*).

Dasar analisisnya adalah:

- a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Mekanisme uji park (*park test*) adalah sebagai berikut:

- a. Membuat regresi OLS terhadap model, kemudian residunya disimpan.
- b. Membuat regresi berikutnya dengan residu sebagai variabel dependen.

Regresi ini dilakukan secara individu terhadap masing-masing variabel independen. Jika ternyata tidak ada hubungan yang signifikan antara residu dengan masing-masing variabel independen maka berarti dalam model tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas dan mengindikasikan telah terjadi homokedastisitas.

#### **3.4.1.2 Uji Autokorelasi**

Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel yang pada periode lain, dengan kata lain variabel gangguan tidak random (Gujarati, 2003). Uji autokorelasi bertujuan

menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 2006).

Dalam penelitian ini digunakan uji Run Test untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi. Uji Run Test digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Run Test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak sistematis (Ghozali, 2006).

#### **3.4.1.3 Uji Multikolinearitas**

Multikolinearitas berarti adanya hubungan linear (korelasi) yang sempurna atau pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi (Gujarati, 2003). Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilakukan dengan menggunakan regresi parsial dengan *Auxiliary Regression* yaitu regresi antar variabel independennya, kemudian akan didapatkan nilai  $R^2$  dari masing-masing regresi tersebut.

Jika nilai R<sup>2</sup> masing lebih tinggi bila dibandingkan dengan nilai R<sup>2</sup> model utama, maka dalam regresi parsial tersebut terdapat multikolinearitas (Ghozali, 2006). Dapat juga dilakukan dengan mengukur nilai *Tolerance* dan menguji *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena  $VIF = 1/Tolerance$ ). Jika suatu variabel bebas memiliki nilai *Tolerance* > 0,10 atau VIF < 10, maka variabel bebas tersebut tidak mengalami multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya, begitu pula sebaliknya.

#### **3.4.1.4 Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2006). Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistic. Namun uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, pada hal secara statistic bisa sebaliknya. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan analisis statistic dengan uji Kolmogorov-Smirnov untuk melihat apakah model regresi terdistribusi secara normal.

#### **3.4.2 Analisis Regresi**

Definisi analisis regresi menurut Gujarati (2003) adalah ketergantungan secara statisti dari satu variabel yaitu variabel dependen, terhadap satu atau lebih variabel lainnya (variabel independen). Analisis regresi bertujuan untuk membuat

estimasi dan/atau membuat perkiraan dari nilai rerata dari variabel dependen atas dasar nilai dari variabel penjelas. Penelitian kali ini menggunakan alat analisis statistik yaitu regresi linier berganda dengan pendekatan *OLS (Ordinary Least Square)*. Analisis ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisa hubungan antar variabel.

Bentuk umum analisis ini yaitu menghubungkan variabel terikat Y dengan satu atau lebih variabel bebas X1, X2, X3...Xn. Pola hubungan antar variabel yang akan dianalisis dilakukan berdasarkan atas data time series yang diperoleh dari pihak lain, baik dari literatur, studi pustaka, atau penelitian-penelitian sejenis sebelumnya yang berkaitan dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini untuk menganalisis penerimaan daerah dari industri pariwisata di Provinsi DKI Jakarta yang dipengaruhi oleh jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara, investasi di industri pariwisata, nilai kurs USD, dan faktor keamanan dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\mathbf{LnY = f( LnW, LnI, LnK, M).....(3.1)}$$

Y = Penerimaan daerah dari industri pariwisata di Provinsi DKI Jakarta

W = Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi DKI Jakarta

I = Investasi di industri pariwisata

K = Nilai kurs USD

M = Faktor keamanan

Supaya bisa diestimasi maka persamaan regresi ditransformasikan ke logaritma berganda sebagai berikut:

$$\mathbf{LogY = a + b_1 LogW + b_2 LogI + b_3 LogK + b_4 M + e_i.....(3.2)}$$

Alasan dipilih bentuk fungsi logaritma adalah:

1. Untuk mendekatkan skala data
2. Untuk mengobati adanya heterokedastisitas

Menurut Gujarati (2003) asumsi utama yang mendasari model regresi linear dengan menggunakan pendekatan OLS adalah:

1. Model regresi linear artinya linear dalam parameter seperti dalam persamaan  $Y_i = b_1 + b_2 X_i + u_i$ .
2. Nilai X diasumsikan non-stokastik artinya nilai X dianggap tetap dalam sampel yang berulang.
3. Nilai rata-rata kesalahan adalah nol, atau  $E(u_i/X_i) = 0$ .
4. Homoskedasitas artinya varians kesalahan sama untuk setiap periode (Homo=sama, skedasitas=sebaran) dan dinyatakan dalam bentuk matematis  $\text{Var}(u_i/X_i) = \sigma^2$ .
5. Tidak ada autokorelasi antar kesalahan (antara  $u_i$  dan  $u_j$  tidak ada autokorelasi) atau secara matematis  $\text{Cov}(u_j, u_j/X_i, X_j) = 0$ .
6. Antara  $u_i$  dan  $X_i$  saling bebas sehingga  $\text{Cov}(u_i/X_i) = 0$ .
7. Jumlah observasi  $n$ , harus lebih besar daripada jumlah parameter yang diestimasi (jumlah variabel bebas).
8. Adanya variabilitas dalam nilai X, artinya nilai X harus berbeda.
9. Model regresi telah dispesifikasi secara benar. Dengan kata lain tidak ada bias (kesalahan) spesifikasi dalam model yang digunakan dalam analisis empirik.
10. Tidak ada multikolinearitas yang sempurna antar variabel bebas.

### **3.4.3 Uji Kriteria Statistik**

#### **3.4.3.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Menurut Gujarati (2003) koefisien determinasi adalah untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dinyatakan dalam persentase. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat terbatas. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat. Namun, koefisien determinasi mempunyai kekurangan yaitu bias terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model. Sebagai ukuran kesesuaian garis regresi dengan sebaran data,  $R^2$  menghadapi masalah karena tidak memperhitungkan derajat bebas (Ghozali, 2006).

#### **3.4.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)**

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang hendak di uji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau:  $H_0 : b_1, b_2, b_3, b_4 \leq 0$  artinya, apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya ( $H_a$ ) tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau:  $H_0 : b_1, b_2, b_3, b_4 > 0$  artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Dasar pengambilan keputusan :

1. Dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel
  - a) Apabila F hitung  $>$  F tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima
  - b) Apabila F hitung  $<$  F tabel, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

Dengan tingkat probabilitas 5 persen ( $\alpha = 0,05$ ) dan nilai df (*degree of freedom*) =  $(n-k-1) = (22 - 4 - 1) = (17)$ , maka dapat diketahui nilai F tabel sebesar 2,96.
2. Dengan menggunakan angka signifikansi
  - a) Apabila angka probabilitas  $>$  0,05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak
  - b) Apabila angka probabilitas  $<$  0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima

#### **3.4.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)**

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Pengujian signifikansi koefisien regresi secara parsial digunakan uji t (t test), uji hipotesisnya:

- 1) Menentukan formulasi hipotesis
  1. Uji t untuk variabel jumlah wisatawan
    - $H_0 : b_1 \leq 0$  (tidak ada pengaruh signifikan antara jumlah wisatawan dengan jumlah penerimaan daerah industri pariwisata di Provinsi DKI Jakarta).

- $H_a : b_1 > 0$  (ada pengaruh positif antara jumlah wisatawan dengan jumlah penerimaan daerah industri pariwisata di Provinsi DKI Jakarta).

2. Uji t untuk variabel investasi diindustri pariwisata

- $H_0 : b_2 \leq 0$  (tidak ada pengaruh signifikan antara investasi diindustri pariwisata dengan jumlah penerimaan daerah industri pariwisata di Provinsi DKI Jakarta).
- $H_a : b_2 > 0$  (ada pengaruh positif antara investasi diindustri pariwisata dengan jumlah penerimaan daerah industri pariwisata di Provinsi DKI Jakarta).

3. Uji t untuk variabel nilai kurs USD

- $H_0 : b_3 \leq 0$  (tidak ada pengaruh signifikan antara nilai kurs USD dengan jumlah penerimaan daerah industri pariwisata di Provinsi DKI Jakarta).
- $H_a : b_3 > 0$  (ada pengaruh positif antara nilai kurs USD dengan jumlah penerimaan daerah industri pariwisata di Provinsi DKI Jakarta).

4. Uji t untuk variabel faktor keamanan

- $H_0 : b_4 \leq 0$  (tidak ada pengaruh signifikan antara faktor keamanan dengan jumlah penerimaan daerah industri pariwisata di Provinsi DKI Jakarta).

- $H_a : b_4 > 0$  (ada pengaruh negatif antara faktor keamanan dengan jumlah penerimaan daerah industri pariwisata di Provinsi DKI Jakarta).

## 2) Kriteria pengujian

Uji ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel.

Rumus untuk memperoleh nilai t hitung adalah:

$$t \text{ hitung} = \frac{\beta_i}{se(\beta_i)} \dots \dots \dots (3.3)$$

dengan:

$\beta_i$  = koefisien regresi

se = standar eror

Dasar pengambilan keputusan :

1. Dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel :
  - a) Apabila  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.
  - b) Apabila  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Dengan angka signifikan 5 % ( $\alpha = 0,05$ ) dan nilai df (*degree of freedom*)  $n-k (22-5) = 17$

2. Dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi
  - a) Apabila angka probabilitas  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

b) Apabila angka probabilitas  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima